



PENGARUH TRANSFER TUNAI BERSYARAT TERHADAP PREVALENSI PEKERJA ANAK

Mesry Asnawaty Sulastri Simorangkir*

Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta
mesry.simorangkir@bpk.go.id

Muhammad Hanri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Depok
muhammad.hanri06@ui.ac.id

*Alamat Korespondensi: *mesry.simorangkir@bpk.go.id*

ABSTRACT

Conditional cash transfer (CCT) programs have become widespread in developing countries to alleviate poverty, provide investment in human capital, and improve long-term living conditions for families. The provision of cash transfers to the poor, depending on certain behavioral requirements such as regular enrollment and school attendance, makes the CCT program a relevant intervention to address the root causes of child labor problems: poverty and a family's vulnerability. This study aims to analyze how far the relationship between conditional cash transfer policies in Indonesia, the family hope program (PKH), and children's decisions to work. This study used secondary data from the Indonesia family life survey (IFLS) in 2007 and 2014 and focused the sample on children aged 6-14. To evaluate the correlation, we utilize the linear probability model (LPM) method. The estimation results indicated that the education component of PKH was significantly correlated with the increase in the number of child laborers, with a tendency to increase children's participation in family businesses without receiving wages. Thus, the cash transfer of the education component of PKH, which has been implemented for seven years, was insufficient for children to stop working.

Keywords: Child Labor, Conditional Cash Transfer (CCT), Family Hope Program, Linear Probability Model (LPM).

ABSTRAK

Program *conditional cash transfer* (CCT) atau transfer tunai bersyarat telah tersebar luas di negara-negara berkembang sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan investasi dalam modal manusia yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pemberian transfer tunai kepada masyarakat miskin dengan bergantung pada persyaratan perilaku tertentu seperti pendaftaran dan kehadiran anak di sekolah secara teratur, menjadikan program CCT sebagai sebuah intervensi yang relevan untuk mengatasi akar penyebab permasalahan pekerja anak yaitu kemiskinan dan kerentanan suatu keluarga. Studi ini bertujuan menganalisis seberapa jauh hubungan antara kebijakan transfer tunai bersyarat di Indonesia dan program keluarga harapan (PKH) terhadap keputusan anak untuk bekerja. Studi ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Indonesia *family life survey* (IFLS) pada tahun 2007 dan 2014, serta dengan memfokuskan sampel pada anak usia 6-14 tahun. Dalam melakukan pengujian, studi ini menggunakan estimasi dengan metode *linear probability model* (LPM). Hasil estimasi mengungkapkan bahwa PKH komponen pendidikan secara signifikan justru berkorelasi positif terhadap kenaikan jumlah pekerja anak, dengan kecenderungan kenaikan partisipasi pekerja anak pada bisnis keluarga dengan tanpa memperoleh upah. Dengan demikian, transfer tunai PKH komponen pendidikan yang telah diimplementasikan selama tujuh tahun belum cukup membawa anak untuk berhenti bekerja.

Kata kunci: *Linear Probability Model* (LPM), Pekerja Anak, Program Keluarga Harapan (PKH), Transfer Tunai Bersyarat

KLASIFIKASI JEL:

C5, H52, J18, J22

CARA MENGUTIP:

Simorangkir, M. A. S. & Hanri, M. (2023). Pengaruh transfer tunai bersyarat terhadap prevalensi pekerja anak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(2). 95-107.

PENDAHULUAN

Keputusan orang tua untuk mengirimkan anaknya ke dalam pasar tenaga kerja erat kaitannya dengan alokasi sumber daya dalam keluarga. Basu & Van (1998) menunjukkan adanya hubungan kemiskinan dan pekerja anak. Hal ini didukung fakta bahwa pekerja anak banyak dijumpai di negara-negara berkembang dan kurang berkembang dengan tingkat kemiskinan yang cukup parah. Redistribusi sumber daya secara langsung kepada rumah tangga miskin melalui program transfer pemerintah menjadi salah satu instrumen yang ditujukan untuk mengatasi isu kemiskinan tersebut, namun kebijakan ini tidak serta merta menurunkan prevalensi pekerja anak dalam keluarga.

International Labour Organization (ILO, 2017) mengestimasi pada tahun 2016 setidaknya terdapat 152 juta anak kelompok usia 5-17 tahun di seluruh dunia yang merupakan pekerja anak, dan 73 juta diantaranya terlibat dalam pekerjaan berbahaya yaitu bentuk-bentuk pekerjaan yang berdampak buruk pada keselamatan, kesehatan, dan perkembangan moral anak. Untuk konteks Indonesia, diperkirakan sekitar 2,3 juta anak yang bekerja atau sebesar 7 persen dari kelompok anak usia 7-14 tahun, dan hampir 600 ribu anak berusia kurang dari 10 tahun telah terlibat dalam aktivitas bekerja.

Menjadi pekerja anak memiliki dampak yang merugikan bagi diri anak itu sendiri karena pekerja anak pada umumnya bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk, upah yang rendah, dan tanpa jaminan sosial. Selain itu, keberadaan pekerja anak sering kali dikaitkan dengan konsekuensi negatif terhadap penurunan kualitas modal manusia, termasuk dalam hal pendidikan. Anak-anak yang bekerja lebih mungkin untuk tidak bersekolah. Hal ini sesuai dengan temuan ILO (2020) yang menyebutkan bahwa lebih dari sepertiga pekerja anak berusia 5-14 tahun tidak bersekolah sama sekali. Selain itu, nilai performa belajar pada anak yang mengombinasikan waktu di antara bersekolah sekaligus bekerja tidak sebaik anak yang tidak bekerja, dengan besaran efek 5-13 persen (Emerson et al., 2017). Merujuk pada temuan tersebut, pekerja anak memiliki implikasi ekonomi yang penting, salah satunya adalah hilangnya potensi pendapatan di masa depan karena tidak bersekolah. Lebih lanjut, bahwa anak-anak lebih mungkin untuk bekerja dan tidak bersekolah jika orang tua mereka bekerja pada usia anak-anak. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan anak untuk mengikuti jejak yang sama dengan orang tua mereka yaitu memasuki pasar tenaga kerja pada usia dini.

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- PKH bidang pendidikan yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu tujuh tahun, belum mampu benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat
- Pemberian transfer tunai bersyarat - PKH justru berkorelasi secara signifikan meningkatkan probabilitas keputusan anak untuk bekerja pada individu anak penerima manfaat sehingga meningkatkan prevalensi pekerja anak
- Program transfer tunai bersyarat atau CCT diharapkan sebagai salah satu intervensi yang relevan untuk mengatasi akar permasalahan pekerja anak.
- Keberlanjutan program bagi penerima manfaat tergantung pada pendaftaran dan kehadiran anak bersekolah, pemberian sejumlah transfer tunai diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga mampu memuluskan konsumsi dasar rumah tangga, yang akan menghilangkan alasan anak untuk bekerja.

Pekerja anak dengan pendidikan yang rendah hanya akan mungkin mendapatkan bidang pekerjaan dengan kapasitas yang rendah dan dengan tingkat upah yang rendah pula sehingga berpotensi menjadi miskin bahkan hingga mereka dewasa. Dengan demikian, permasalahan pekerja anak sangat mungkin mengarah pada konsekuensi kemiskinan yang seringkali diturunkan dari generasi ke generasi (Baland & Robinson, 2000; De Hoop & Rosati, 2014). Akibatnya, pekerja anak akan sulit keluar dari jebakan pekerja anak dan jebakan kemiskinan jika tidak diintervensi melalui kebijakan pemerintah.

Peningkatan akses terhadap pendidikan menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan kompetitif. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang fundamental dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Todaro & Smith, 2015). Melalui pendidikan yang lebih tinggi dapat dicapai produktivitas yang semakin baik yang tercermin dari memiliki pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi sehingga mampu memiliki masa depan yang lebih baik. Studi di berbagai negara turut menunjukkan tingginya tingkat pengembalian dari pendidikan (*rate of return to education*), demikian pula hasil studi empiris yang dilakukan untuk konteks Indonesia (Dumauli, 2015).

Untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bersifat jangka panjang, pemerintah di berbagai negara merumuskan

sejumlah kebijakan di bidang pendidikan, di antaranya melalui kebijakan penyediaan infrastruktur pendidikan, tunjangan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja guru, serta berbagai dukungan dana untuk membiayai pendidikan. Dalam kurun waktu terakhir, berbagai negara khususnya negara-negara berkembang mengimplementasikan program transfer tunai bersyarat atau *conditional cash transfer* (CCT) sebagai salah satu bentuk intervensi dalam sistem perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (De Hoop & Rosati, 2014). Program CCT menargetkan rumah tangga miskin dan sangat miskin melalui pemberian sejumlah uang tunai sebagai sumber pendapatan tambahan yang diberikan setiap bulan, yang diikuti dengan persyaratan di bidang pendidikan berupa pendaftaran anak sesuai jenjang pendidikan serta memastikan kehadiran minimum anak di sekolah. Program CCT dipandang relevan sebagai salah satu upaya yang terbaik dalam mengatasi secara langsung akar permasalahan pekerja anak, yaitu kemiskinan dan kerentanan rumah tangga. Pada akhirnya, program CCT diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan.

Studi empiris yang ditujukan untuk mengukur pengaruh CCT terhadap pekerja anak telah dilakukan di berbagai negara. Hal ini menjadi bukti bahwa permasalahan pekerja anak telah menjadi isu internasional. Dengan menggunakan metode yang beragam, studi empiris yang dilakukan di berbagai negara tersebut melaporkan hasil yang bervariasi, menunjukkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang unik berkaitan dengan permasalahan pekerja anak. Mengingat jumlah pekerja anak yang cukup besar di Indonesia serta konsekuensi ekonomi dan nonekonomi yang timbul dari keberadaan pekerja anak sedangkan penelitian terkait topik ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Untuk itu, studi ini berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang program CCT dengan mengambil kasus transfer tunai bersyarat PKH, serta untuk menambah literatur yang memanfaatkan data panel longitudinal dalam menganalisis hubungan antara transfer tunai bersyarat tersebut terhadap keputusan bekerja individu anak penerima manfaat.

STUDI LITERATUR

Definisi Pekerja Anak

Sebelum mendalami lebih jauh terkait permasalahan pekerja anak, perlu untuk memahami definisi dari pekerja anak terlebih dahulu. Edmonds (2009) membahas beragam terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian dan publikasi di berbagai negara dalam mengategorikan pekerja anak. Meskipun belum

ada konsensus yang dicapai, kegiatan yang dilakukan pekerja anak secara garis besar dapat dijelaskan ke dalam dua kategori, yaitu: keterlibatan di pasar tenaga kerja (*market work*) dan pekerjaan rumah tangga (*domestic work*). *Market work* biasanya menggambarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam atau di luar rumah tangga, baik dibayar atau tidak dibayar (Nasution, 2016). Di sisi lain, *domestic work* merupakan kegiatan nonekonomi yang mencakup pekerjaan seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anggota keluarga.

Definisi pekerja anak dilihat dari usia legal anak yang diperbolehkan bekerja juga beragam di masing-masing negara. Di Indonesia, setelah meratifikasi konvensi ILO nomor 138 melalui pengesahan Undang-Undang nomor 20 tahun 1999, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013, menetapkan usia 15 tahun merupakan batas usia minimum yang diperkenankan untuk bekerja, dengan batasan waktu bekerja yang diperbolehkan adalah sampai dengan 40 jam per minggu (Mahyani, 2018).

Teori Ekonomi tentang Pekerja Anak

Dalam memahami fenomena penawaran tenaga kerja anak pada pasar tenaga kerja, salah satunya adalah melalui karya Becker (1965) tentang alokasi waktu (*A theory of allocation of time*). Teori ini menjelaskan bahwa segala pilihan yang ditujukan untuk memenuhi preferensi rumah tangga seperti jumlah anak, pilihan terkait alokasi waktu bagi setiap individu rumah tangga baik untuk bersekolah, bekerja, waktu luang, serta produksi rumah tangga, merupakan hasil dari keputusan rumah tangga yang diambil secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang maksimal baik untuk saat ini dan di masa depan.

Dalam kaitannya dengan teori tersebut, salah satu keputusan yang diambil oleh rumah tangga sangat miskin adalah dengan tetap bekerja walaupun dengan tingkat upah yang sangat rendah. Hal ini karena memiliki pekerjaan meskipun dengan upah yang rendah dan bahkan tidak layak, namun tetap dipandang lebih baik daripada tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Hal ini didorong kebutuhan untuk bertahan hidup atau dengan kata lain *opportunity cost* yang sangat besar dari menganggur bagi rumah tangga miskin (Schnabel, 2021). Pilihan ini diikuti dengan konsekuensi hampir seluruh anggota keluarga terlibat dalam aktivitas bekerja, termasuk anak, dengan alasan penghasilan kepala keluarga maupun orang dewasa dalam rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, Basu & Van (1998) mengembangkan teori untuk menjelaskan konsep keberadaan pekerja anak. Dengan menyajikan kerangka dasar pekerja anak, salah satunya melalui aksioma kemewahan (*luxury axiom*) yang menggambarkan bahwa rumah tangga akan mengirimkan anak mereka ke pasar tenaga kerja hanya jika tingkat upah atau pendapatan anggota rumah tangga dewasa sangat rendah yaitu kurang dari tingkat minimum konsumsi rumah tangga yang dapat ditolerir. Pada kondisi ini, kebutuhan paling dasar dari rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Untuk memuluskan konsumsi kebutuhan dasar saat ini, rumah tangga cenderung akan mengirimkan anak-anak mereka untuk bekerja. Namun sebaliknya, anak-anak tersebut akan segera ditarik dari pasar tenaga kerja ketika pendapatan rumah tangga cukup mengalami peningkatan. Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai penyebab utama keberadaan pekerja anak. Hal ini didukung fakta bahwa dominasi pekerja anak dijumpai pada rumah tangga miskin di negara-negara berkembang dan kurang berkembang, dimana tingkat upah sangat rendah (Basu & Van, 1998).

Teori lain terkait keberadaan pekerja anak adalah dari Baland & Robinson (2000) yang menjelaskan bahwa keberadaan pekerja anak didorong oleh kondisi dimana orang tua mengalami kesulitan mengakses pasar keuangan untuk memperoleh pinjaman baik untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan untuk pengeluaran pendidikan anak, serta kebutuhan untuk bertahan hidup ketika terjadi guncangan. Maka, mempekerjakan anak menjadi salah satu *coping strategy* yang dipilih oleh rumah tangga. Dalam hal ini, mengirimkan anak untuk bekerja adalah sebagai alat untuk mengalihkan pendapatan di masa depan agar dapat dinikmati pada saat ini.

Program Transfer Tunai Bersyarat atau CCT dan Pekerja Anak

Program transfer tunai adalah pemberian sejumlah uang tunai kepada rumah tangga miskin sangat miskin sebagai sumber pendapatan eksogen yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga tersebut. Transfer tunai ini dapat langsung digunakan oleh rumah tangga penerima untuk jenis kebutuhan apapun yang dikenal sebagai program transfer tunai tanpa syarat. Berbeda dengan program CCT yang merupakan transfer pendapatan dengan persyaratan perilaku tertentu, biasanya di bidang kesehatan dan pendidikan, yang harus dipenuhi oleh rumah tangga penerima program (De Hoop & Rosati, 2014).

Penelitian terkait dampak dari transfer tunai terhadap pekerja anak telah banyak dilakukan terutama di negara Amerika Latin dan Afrika. Skoufias & Parker (2001) melakukan pengujian dampak program progres di Meksiko. Edmonds & Schady (2012) menguji dampak program *bono de desarrollo humano* (BDH) di Ekuador. Attanasio et al. (2010) menguji dampak program *familias en acción* (FA) di Kolombia. Covarrubias et al. (2012) menguji dampak Malawi *social cash-transfer scheme* (SCTS) di Malawi, dan berbagai penelitian lainnya yang dilakukan di berbagai negara (De Hoop et al., 2019; Hidayatina & Garces-Ozanne, 2019; Lee & Hwang, 2016). Dari sejumlah studi empiris tersebut, transfer tunai bersyarat memengaruhi keberadaan pekerja anak melalui persyaratan yang mewajibkan penerima manfaat untuk mendaftarkan anak di sekolah, dan memastikan kehadiran reguler anak di sekolah setiap bulan. Selain itu, pemberian transfer tunai bersyarat juga dipandang sebagai injeksi pendapatan eksogen bagi rumah tangga penerima manfaat yang dapat mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap pendapatan yang diperoleh dari anak yang bekerja. Namun di sisi lain, pemberian uang tunai juga dapat meningkatkan bisnis milik keluarga, yaitu ketika transfer tunai dialihkan pada aset produktif seperti menambah ternak atau lahan kecil pertanian. Kondisi ini justru dapat mendorong kebutuhan kontribusi anak untuk bekerja menjadi meningkat. Dengan demikian, secara teori, dampak dari transfer tunai terhadap pekerja anak belum dapat ditentukan.

Program Transfer Tunai Bersyarat di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi program transfer tunai bersyarat melalui program keluarga harapan (PKH) sejak tahun 2007. Serupa dengan program CCT di negara lain, PKH menjadi alat kebijakan yang penting di Indonesia dengan tujuan utama untuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan investasi modal manusia dalam jangka Panjang (Angraeni, 2019).

Untuk itu, Kementerian Sosial RI merumuskan tiga sasaran utama dari PKH, yaitu aspek kesejahteraan sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan. Selain itu, dirancang pula berbagai indikator keberhasilan PKH pada ketiga aspek tersebut. Secara khusus untuk aspek pendidikan, indikator keberhasilan yang dirancang berupa (1) meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), (2) meningkatnya kehadiran bersekolah siswa SD dan SMP, (3) menurunnya angka putus sekolah, (4)

menurunnya angka pengulangan kelas, (5) meningkatnya rata-rata lama bersekolah, serta (6) menurunnya jam kerja dan partisipasi bekerja anak penerima manfaat (World Bank, 2011; Sari, 2015).

PKH mewajibkan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh rumah tangga miskin dan sangat miskin untuk dapat menjadi penerima PKH bidang pendidikan yang disebut sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Rumah tangga harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), memiliki anak usia sekolah, wajib mendaftarkan anak sesuai jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun sekolah menengah atas (SMA), serta turut memastikan kehadiran anak mereka di sekolah dengan minimal kehadiran 85% dari hari belajar efektif setiap bulan (World Bank, 2011). Besaran transfer PKH yang diterima individu penerima manfaat pada tahun 2014 untuk kategori pendidikan adalah berkisar antara Rp600.000,00 per tahun untuk anak SD/ sederajat hingga Rp1.000.000,00 per tahun untuk anak SMP/ sederajat. Pemerintah membatasi batasan maksimum yang dapat diperoleh KPM sebesar Rp2.200.000,00 per tahun per rumah tangga terlepas dari berapapun anak dalam rumah tangga tersebut (Cahyadi et al., 2018; Guna et al., 2015; Lee & Hwang, 2016; World Bank, 2011).

Melalui program transfer pendapatan, dalam jangka pendek, PKH diharapkan mampu melindungi dan membantu anak-anak untuk tetap bersekolah. PKH ditujukan untuk menutupi biaya pribadi pendidikan yang timbul sebagai konsekuensi dari bersekolah baik bersifat langsung (seperti untuk seragam dan alat tulis) maupun tidak langsung (seperti untuk transportasi dan uang saku) yang ditujukan untuk mendukung kehadiran anak bersekolah. Biaya pribadi pendidikan merupakan biaya yang harus ditanggung oleh orang tua anak (Badan Pusat Statistik, 2015; Kemendikbud, 2020). Selain itu, PKH ditujukan untuk mengompensasi hilangnya pendapatan akibat keputusan anak untuk tetap bersekolah daripada bekerja.

Untuk jangka panjang, dengan terus mendorong kehadiran anak bersekolah mulai jenjang SD sampai dengan SMA, PKH diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kognitif dan dalam jangka panjang mengarah pada peningkatan produktivitas di pasar tenaga kerja. Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2007, implementasi PKH menunjukkan berbagai keberhasilan yaitu meningkatnya *outcome* kesehatan, seperti meningkatnya imunisasi lengkap pada anak, menurunnya kemungkinan anak tumbuh *stunting*, serta keberhasilan yang diperoleh di bidang pendidikan berupa tingkat partisipasi sekolah yang meningkat 4% di daerah

yang mendapatkan PKH dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapatkan PKH (Cahyadi et al., 2018). Mengacu pada berbagai keberhasilan yang diperoleh tersebut, pemerintah terus melakukan perluasan cakupan KPM yang semula 432 ribu di tahun 2007 menjadi sepuluh juta KPM di tahun 2020 dan diikuti pula dengan peningkatan pagu anggaran PKH (Kemensos RI, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sampel

Studi ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari Indonesia *family life survey* (IFLS) atau survei aspek kerumahtanggaan Indonesia (Sakerti) yang dikelola oleh Rand Corporation (2007, 2014), sehingga data yang terbentuk merupakan data panel longitudinal yang diperoleh dari dua gelombang terakhir IFLS yaitu IFLS 4 (2007) dan IFLS 5 (2014). Data tahun 2007 menunjukkan kondisi individu anak dan rumah tangga sebelum implementasi transfer tunai bersyarat PKH. Selanjutnya, untuk dapat mengevaluasi transisi yang terjadi pada perilaku individu anak setelah adanya kebijakan PKH terhadap keputusan bekerja anak baik bagi penerima program maupun anak yang bukan menjadi penerima program, digunakan data tahun 2014 yang merupakan tahun ketujuh implementasi PKH. Selain data yang bersumber dari IFLS, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder lainnya berupa data rata-rata upah tenaga kerja dewasa yang diperoleh dari hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas), serta data indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang diperoleh dari hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2007 dan 2014 (Badan Pusat Statistik, 2007a, 2007b, 2014a, 2014b).

Sampel dalam studi ini adalah individu anak usia 6-14 tahun pada tahun 2007 (*baseline*). Rentang usia tersebut dipilih karena usia enam tahun merupakan usia minimum anak pada tingkat sekolah dasar, dan menjadi target pemberian PKH bidang pendidikan pada tingkat dasar. Sedangkan 14 tahun merupakan batas usia anak yang tidak diperkenankan untuk bekerja (Konvensi ILO 138/1973; UU 20/1999). Sampel diperoleh dari kombinasi buku V dan buku IIIA pada IFLS, sehingga diperoleh unit observasi dalam penelitian ini adalah 9.916 individu anak pada 3.896 rumah tangga untuk dua gelombang IFLS.

Strategi Empiris

Studi ini menggunakan definisi bekerja dengan mengacu pada De Hoop & Rosati (2014) yang mendefinisikan bekerja sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas bekerja pada kegiatan ekonomi (*market work*). Yang artinya anak dianggap bekerja

Tabel 1. Definisi Variabel Penelitian (n = 9916)

Nama Variabel	Definisi	Sumber
Variabel Dependen		
Bekerja	<i>dummy</i> (1 = jika anak bekerja untuk mendapatkan upah (<i>paid work</i>) dan/atau bekerja tanpa upah pada usaha milik keluarga (<i>unpaid work</i>); 0 = jika anak tersebut tidak bekerja)	IFLS4 & IFLS5
Bekerja dengan upah	<i>dummy</i> (1 = jika anak bekerja dengan mendapatkan upah ; 0=jika sebaliknya)	IFLS4 & IFLS5
Bekerja tanpa upah	<i>dummy</i> (1 = jika anak bekerja tanpa upah pada bisnis milik keluarga; 0=jika sebaliknya)	IFLS4 & IFLS5
Variabel Independen		
Kebijakan: PKH	<i>dummy</i> (1 = anak menerima manfaat transfer tunai bersyarat PKH; 0 = jika anak tidak menerima manfaat transfer tunai bersyarat PKH)	IFLS4 & IFLS5
Variabel Kontrol		
Karakteristik anak		
Bersekolah	<i>dummy</i> (1 = anak masih bersekolah; 0 = tidak sedang bersekolah)	IFLS4 & IFLS5
Usia anak	usia anak (tahun)	IFLS4 & IFLS5
Jenis kelamin anak	<i>dummy</i> (1 = Laki-laki; 0 = Perempuan)	IFLS4 & IFLS5
Karakteristik rumah tangga (KRT)		
Usia KRT	usia kepala rumah tangga (tahun)	IFLS4 & IFLS5
Jenis kelamin KRT	<i>dummy</i> jenis kelamin kepala rumah tangga (1 = perempuan; 0 = laki-laki)	IFLS4 & IFLS5
Lama tahun bersekolah KRT	lama tahun bersekolah kepala rumah tangga (tahun)	IFLS4 & IFLS5
Status bekerja KRT	status bekerja kepala rumah tangga (1 = jika bekerja; 0 = jika tidak bekerja)	IFLS4 & IFLS5
Ukuran RT	ukuran rumah tangga/jumlah anggota rumah tangga (orang)	IFLS4 & IFLS5
<i>Per capita expenditure</i>	pengeluaran per kapita rumah tangga (rupiah)	IFLS4 & IFLS5
<i>ln_per capita expenditure (pce)</i>	logaritma natural dari pengeluaran per kapita rumah tangga (%)	IFLS4 & IFLS5
Karakteristik komunitas/wilayah/regional		
Perkotaan/perdesaan	<i>dummy</i> lokasi tempat tinggal (1 = perkotaan; 0 = perdesaan)	IFLS4 & IFLS5
Jumlah sekolah dasar	jumlah sekolah dasar (SD) yang tersedia pada komunitas (unit)	IFLS4 & IFLS5
Jumlah sekolah menengah pertama	jumlah sekolah menengah pertama (SMP) yang tersedia pada komunitas (unit)	IFLS4 & IFLS5
Jarak ke sekolah dasar	jarak (lama waktu tempuh) dari rumah tinggal anak ke SD terdekat dalam satu kali perjalanan (menit)	IFLS4 & IFLS5
Jarak ke sekolah menengah pertama	jarak (lama waktu tempuh) dari rumah tinggal anak ke SMP terdekat dalam satu kali perjalanan (menit)	IFLS4 & IFLS5
Rata-rata upah	rata-rata upah/gaji tenaga kerja dewasa pada tingkat Kabupaten/Kota (rupiah)	Sakernas 2007 & Sakernas 2014
<i>Ln_rata-rata upah TK dewasa</i>	logaritma natural dari rata-rata upah/gaji tenaga kerja dewasa pada tingkat Kabupaten/Kota (%)	Sakernas 2007 & Sakernas 2014
<i>Poverty gap index/P1</i>	indeks Kedalaman Kemiskinan pada tingkat Kabupaten/Kota, menunjukkan seberapa jauh gap antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.	Susenas 2007 & Susenas 2014

Sumber: Diolah Penulis

ketika terlibat dalam kegiatan produksi barang/jasa, baik dengan memperoleh upah (*paid*) maupun tanpa upah (*unpaid*) karena bekerja pada bisnis milik keluarga. Sehingga, dalam studi ini keterlibatan anak pada jenis pekerjaan mengurus rumah tangga (*domestic work*) seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya tidak termasuk dalam definisi bekerja. Dengan demikian, variabel terikat dalam studi ini adalah partisipasi anak dalam aktivitas bekerja pada jenis pekerjaan tertentu (*work*), yang merupakan *binary variable*. Bernilai satu jika anak bekerja dengan mendapatkan upah (*paid work*) dan/atau bekerja tanpa upah karena berkontribusi pada usaha milik keluarga (*unpaid work*), dan bernilai nol jika anak tidak bekerja.

Selanjutnya, variabel bebas utama adalah kebijakan transfer tunai bersyarat dalam hal ini adalah PKH. Variabel ini merupakan variabel *dummy* yang bernilai satu jika anak menerima manfaat transfer tunai bersyarat selama anak tersebut menerima PKH pertama kali di usia sepanjang masih dalam rentang usia pekerja anak dan bernilai nol jika anak tidak menerima manfaat transfer tunai PKH atau menerima manfaat pertama kali di usia bukan dalam rentang usia pekerja anak. Selain itu, dalam penelitian terdapat beberapa variabel kontrol untuk mengontrol latar belakang sosial ekonomi anak yang banyak digunakan dalam literatur sebelumnya, berupa karakteristik anak, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik komunitas/regional. Seluruh

variabel dan pengukuran di dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Untuk mengevaluasi hubungan antara transfer tunai bersyarat - PKH dengan prevalensi pekerja anak, studi ini menggunakan metode *ordinary least square* dengan *robust standard errors*, sehingga merupakan *reduced form* dari *linear probability model* (LPM) atas keputusan anak untuk bekerja. Model dengan variabel terikat yang bersifat biner, selain dengan LPM, dapat juga diestimasi dengan menggunakan metode probit atau logit. Namun, dalam studi ini LPM dipilih untuk tujuan menyederhanakan interpretasi dari koefisien yang diestimasi. LPM memungkinkan interpretasi secara langsung dari koefisien estimasi sebagai persentase perubahan probabilitas keputusan anak untuk bekerja yang dihasilkan dari perubahan satu unit pada variabel independen (*explanatory variable*) dalam model. Sedangkan, dengan metode probit atau logit, agar dapat menginterpretasi koefisien estimasi masih diperlukan transformasi ke dalam bentuk efek marginal rata-rata (*average marginal effect*). Walaupun demikian, LPM memang memiliki kelemahan dibanding probit atau logit, dimana hasil prediksi dengan menggunakan LPM dapat berada di luar interval [0,1] dan *error term* yang bersifat heteroskedastis. Karena studi ini bertujuan untuk menganalisis korelasi di antara probabilitas pilihan anak untuk bekerja dan bukan

untuk tujuan peramalan (*forecast*), maka LPM dapat diadopsi sebagai metode estimasi dalam studi ini. Untuk *problem* heteroskedastis yang menjadi kelemahan dari LPM diatasi dengan mengestimasi model menggunakan *robust standard errors*. Dengan demikian, spesifikasi model dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 PKH_{it} + \beta_2 X_{KAit} + \beta_3 X_{KRTit} + \beta_4 X_{KKit} + \varepsilon_{it}$$

(t = 0,1; i=1,...,n)

Dimana Y_{it} merupakan probabilitas keputusan anak untuk bernilai satu jika individu anak memutuskan untuk terlibat dalam aktivitas bekerja dengan upah dan/atau tanpa upah dan nol jika individu anak memutuskan untuk tidak bekerja; PKH_{it} bernilai satu jika individu anak menerima manfaat transfer tunai bersyarat PKH dan nol jika sebaliknya; X_{KAit} , X_{KRTit} , dan X_{KKit} merupakan vektor dari karakteristik individu anak, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik komunitas/wilayah/regional yang merupakan variabel kontrol dalam model karena berpengaruh terhadap probabilitas keputusan anak untuk bekerja; dan ε_{it} adalah *error term* (Zahra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (n = 9916)

Nama Variabel	Jumlah Observasi	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
Variabel Dependen					
Bekerja	9916	0.107	0.309	0	1
Bekerja dengan upah	9916	0.033	0.18	0	1
Bekerja tanpa upah	9916	0.075	0.263	0	1
Variabel Independen					
PKH	9916	0.02	0.141	0	1
Variabel Kontrol					
Bersekolah	9916	0.799	0.401	0	1
Usia anak	9916	12.847	4.219	6	21
Jenis kelamin anak	9916	0.526	0.499	0	1
Usia KRT	9916	45.532	10.426	11	94
Jenis kelamin KRT	9916	0.137	0.344	0	1
Lama tahun bersekolah KRT	9916	7.979	4.459	0	22
Status bekerja KRT	9916	0.915	0.279	0	1
Ukuran RT	9916	4.986	1.721	1	22
<i>Per capita expenditure</i>	9916	711,826	667,836	49733.332	22762766
<i>Ln_per capita expenditure (pce)</i>	9916	13.201	0.725	10.814	16.941
Perkotaan/perdesaan	9916	0.57	0.495	0	1
Jumlah sekolah dasar	9916	4.996	3.808	0	37
Jumlah sekolah menengah pertama	9916	3.747	2.156	0	28
Jarak ke sekolah dasar	9916	12.02	34.254	1	1800
Jarak ke sekolah menengah pertama	9916	18.177	27.939	1	1800
Rata-rata upah	9916	1,404,941	572,184	543708.88	4050130
<i>Ln_rata-rata upah TK dewasa</i>	9916	14.08	0.386	13.206	15.214
<i>Poverty gap index/P1</i>	9916	1.9	1.26	0	6.54

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam model. Dari 9.916 individu anak yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 10,7% anak terlibat dalam aktivitas bekerja, dan hanya 2,0% anak dari keseluruhan sampel penelitian yang menjadi penerima transfer tunai bersyarat PKH. Usia rata-rata anak dalam sampel adalah berkisar 12 tahun. Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa jumlah anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan dimana anak laki-laki sebesar 52,6% dan anak perempuan sebesar 47,4%. Untuk karakteristik rumah tangga, terlihat bahwa rata-rata usia kepala rumah tangga adalah 45 tahun, dengan mayoritas kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki dan hanya 13,7% kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan. Rata-rata lama tahun bersekolah kepala rumah tangga dalam sampel penelitian adalah tujuh tahun. Artinya kepala rumah tangga sebagian besar berpendidikan rendah, karena hanya menamatkan jenjang pendidikan SD. Untuk status bekerja terlihat bahwa hampir seluruh kepala rumah tangga bekerja (91,5%). Selanjutnya, rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah sebanyak lima orang, dengan pengeluaran per kapita rata-rata dalam rumah tangga adalah sebesar Rp711.826,00.

Untuk wilayah tempat tinggal, anak-anak dalam sampel penelitian lebih banyak tinggal di perkotaan dibandingkan perdesaan. Sedangkan, untuk tingkat komunitas jumlah rata-rata infrastruktur sekolah yang tersedia adalah sebanyak empat unit SD dan tiga unit SMP, dengan waktu tempuh yang dibutuhkan anak untuk dapat mengakses sekolah adalah rata-rata 12 menit untuk SD dan 18 menit untuk SMP dalam satu kali perjalanan. Kemudian, untuk rata-rata upah tenaga kerja dewasa di tingkat kabupaten/kota berkisar sebesar Rp1.404.941,00, dengan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index/P1*) pada tingkat kabupaten/kota sebesar 1,9.

Hasil Estimasi

Tabel 3 menyajikan hasil estimasi dengan menggunakan metode *linear probability model* (LPM). *Stepwise regression* pada tabel tersebut menunjukkan secara konsisten bahwa kebijakan transfer tunai bersyarat memiliki korelasi positif dengan probabilitas anak untuk terlibat dalam aktivitas bekerja.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian dari Lee & Hwang (2016) dan Pais et al. (2017) yang menunjukkan bahwa program transfer tunai bersyarat dapat meningkatkan partisipasi bekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai transfer tunai bersyarat dipandang tidak cukup besar bagi rumah tangga untuk menggantikan hilangnya

pendapatan (*opportunity cost*) ketika anak tidak bekerja, sehingga orang tua tidak dapat merealokasi hilangnya pendapatan tersebut dengan uang yang diperoleh dari program transfer. Dengan kata lain, transfer tunai bersyarat belum memberikan jaminan finansial yang cukup bagi rumah tangga miskin sehingga rumah tangga tetap bergantung terhadap upah dari anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, anak akan tetap bekerja atau terdorong untuk bekerja meskipun telah memperoleh sejumlah transfer tunai. Hasil penelitian ini sekaligus mengonfirmasi teori Basu & Van (1998) yang menyatakan bahwa anak bekerja sebagai respons dari kemiskinan, yaitu ketika kebutuhan dasar rumah tangga tidak mampu dipenuhi oleh anggota rumah tangga dewasa tanpa kontribusi upah pekerja anak.

Hasil studi ini sejalan juga dengan hasil penelitian De Hoop et al. (2019), yang menemukan bahwa CCT mendorong anak untuk bersekolah. Namun, besaran CCT yang diterima tidak mampu memenuhi keseluruhan biaya pribadi pendidikan (seperti untuk seragam, transportasi, alat tulis, dll) yang harus ditanggung orang tua untuk mendukung kehadiran anak bersekolah. Dengan demikian, anak tetap harus mengombinasikan waktu di antara bekerja dan bersekolah.

Di sisi lain, hasil estimasi dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa transfer tunai dapat menurunkan partisipasi bekerja anak (Attanasio et al., 2010; Edmonds & Schady, 2012; Hidayatina & Garces-Ozanne, 2019; Skoufias & Parker, 2001).

Temuan studi ini juga menunjukkan bahwa karakteristik anak berupa status bersekolah anak, usia anak, dan jenis kelamin anak memiliki korelasi yang signifikan dalam memengaruhi probabilitas anak untuk terlibat dalam aktivitas bekerja. Status bersekolah anak menurunkan probabilitas anak untuk terlibat dalam aktivitas bekerja. Hal ini sesuai dengan *the theory allocation of time*, bahwa meningkatnya waktu anak untuk bersekolah akan mengakibatkan berkurangnya waktu yang dimiliki anak untuk bekerja dan *leisure* (De Hoop & Rosati, 2014).

Karakteristik rumah tangga seperti lama tahun bersekolah kepala rumah tangga, status bekerja kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, juga memiliki korelasi yang signifikan dengan keputusan anak untuk bekerja (Ayuningtyas, 2021). Dengan lama tahun bersekolah kepala rumah tangga yang lebih tinggi maka probabilitas anak dalam rumah tangga tersebut untuk terlibat dalam aktivitas bekerja menjadi lebih kecil (Sari, 2019). Karena dengan pendidikan yang lebih tinggi yang diukur melalui lama tahun bersekolah,

Tabel 3. Hasil estimasi dengan *Linear Probability Model* (LPM)

Variabel Independent	Variabel Dependen			
	Bekerja (1)	Bekerja (2)	Bekerja (3)	Bekerja (4)
PKH	0.139*** (0.0303)	0.106*** (0.0296)	0.0853*** (0.0297)	0.0876*** (0.0299)
Bersekolah		-0.0745*** (0.00944)	-0.0617*** (0.00938)	-0.0621*** (0.00939)
Usia anak		0.0116***	0.0129***	0.0134***
Jenis kelamin anak		(0.000653)	(0.000822)	(0.000968)
		0.0318*** (0.00601)	0.0342*** (0.00598)	0.0341*** (0.00597)
Usia KRT			-0.000807** (0.000333)	-0.000702** (0.000333)
Jenis kelamin KRT			0.0195* (0.0105)	0.0202* (0.0105)
Lama tahun bersekolah KRT			-0.00592*** (0.000747)	-0.00511*** (0.000770)
Status bekerja KRT			0.0493***	0.0474***
Ukuran RT			(0.0109)	(0.0109)
			0.00714*** (0.00199)	0.00774*** (0.00202)
In_per capita expenditure			-0.00344 (0.00511)	-8.09e-05 (0.00544)
Perkotaan/perdesaan				-0.0222*** (0.00696)
Jumlah sekolah dasar				-0.00142 (0.000954)
Jumlah sekolah menengah pertama				0.000454 (0.00163)
Jarak ke sekolah dasar				0.000180* (0.000108)
Jarak ke sekolah menengah pertama				-7.73e-06 (7.15e-05)
In_rata-rata upah TK dewasa				-0.0142 (0.0122)
Indeks kedalaman kemiskinan/P1				-0.00327 (0.00270)
Konstanta	0.104*** (0.00310)	-0.00157 (0.0124)	0.0166 (0.0634)	0.176 (0.169)
Jumlah observasi	9,916	9,916	9,916	9,916
R-squared	0.004	0.054	0.065	0.067

Tanda kurung berisikan *robust standar error*

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Diolah Penulis

memungkinkan memiliki rumah tangga dengan kesejahteraan lebih baik serta memiliki pandangan yang lebih baik terhadap pengembalian dari investasi pendidikan anak, sehingga lebih kecil probabilitas anak dalam rumah tangga tersebut untuk bekerja (Del Carpio et al., 2016; Edmonds & Schady, 2012; Nasution et al., 2014).

Lebih lanjut, temuan studi ini juga menunjukkan bahwa status bekerja orang tua dapat meningkatkan probabilitas anak untuk bekerja. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemberian transfer tunai yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan sangat miskin, di mana kepala rumah tangga biasanya lebih banyak bekerja pada sektor pertanian atau sektor jasa informal. Sehingga

terdapat alasan bagi rumah tangga untuk tujuan meminimalkan biaya tenaga kerja, maka rumah tangga akan memilih mempekerjakan anak yang ada dalam rumah tangga tersebut untuk bersama-sama mengelola usaha milik keluarga (Unicef, 2012).

Demikian juga halnya dengan karakteristik komunitas/wilayah/regional berupa lokasi geografis tempat tinggal (perkotaan/perdesaan) dan jarak tempuh ke sekolah dasar secara signifikan memengaruhi probabilitas anak untuk terlibat dalam aktivitas bekerja. Lokasi geografis turut berperan penting memengaruhi probabilitas anak untuk bekerja. Anak yang tinggal di perkotaan memiliki probabilitas untuk bekerja lebih kecil dari

Tabel 4. Hasil estimasi dengan LPM dan FE berdasarkan jenis pekerjaan

Variabel Independen	Variabel dependen					
	Bekerja (dengan dan/atau tanpa upah)		Bekerja dengan upah		Bekerja tanpa upah	
	LPM (1)	FE (2)	LPM (3)	FE (4)	LPM (5)	FE (6)
Kebijakan:						
PKH	0.0876*** (0.0299)	0.104*** (0.0355)	0.0250 (0.0186)	0.0256 (0.0232)	0.0603** (0.0261)	0.0766** (0.0324)
Kontrol:						
Karakteristik anak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Karakteristik rumah tangga	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Karakteristik komunitas/wilayah/regional	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Provinsi FE	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
Tahun FE	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
Konstanta	0.176 (0.169)	-0.00124 (0.453)	0.140 (0.0990)	0.313 (0.310)	0.00491 (0.146)	-0.0617 (0.441)
Jumlah observasi	9,916	9,916	9,916	9,916	9,916	9,916
R-squared	0.067	0.068	0.067	0.078	0.030	0.033

Kolom (1), (3), dan (5) estimasi dengan *linear probability model* (LPM) dengan tanda kurung berisikan *robust standar error*; kolom (2), (4), dan (6) estimasi dengan *fixed effect model* dengan mengontrol heterogenitas tahun dan regional (provinsi), tanda kurung berisikan *robust standar error* dengan *cluster* pada tingkat rumah tangga;

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Diolah Penulis

anak yang tinggal di perdesaan (Perdana, 2015). Hal ini erat kaitannya dengan fakta bahwa di perdesaan biasanya memiliki infrastruktur sekolah yang lebih sedikit dan tidak sebaik di perkotaan (Hidayatina & Garcés-Ozanne, 2019; Perdana, 2015), sehingga sangat mungkin dibutuhkan waktu tempuh yang lebih lama untuk mengakses sekolah terdekat. Hal ini berimplikasi pada peningkatan komponen biaya pendidikan yaitu biaya transportasi yang harus ditanggung oleh anak-anak di perdesaan menjadi lebih mahal.

Identifikasi

PKH tidak dapat diperoleh secara acak. Diperkirakan terdapat beberapa faktor yang tidak dapat diobservasi namun dapat memengaruhi probabilitas sebuah keluarga untuk mendapatkan PKH, dan di saat yang sama juga mendorong keluarga tersebut mengirimkan anaknya menjadi pekerja anak. Adanya *selection bias* dalam mendapatkan PKH juga dapat mengakibatkan estimasi yang dihasilkan dengan metode LPM menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, penggunaan metode panel data *fixed effect* (FE) diharapkan dapat mengeliminasi kurang akuratnya estimasi dengan LPM. Pada metode FE, *regional fixed effect* di tingkat provinsi ditambahkan sebagai variabel kontrol dalam model. Tujuannya untuk memperhitungkan potensi bias dari heterogenitas wilayah yang tidak terukur (*unmeasured regional effect*) akibat perbedaan karakteristik khusus antar wilayah

(regional) di Indonesia (seperti budaya, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, akses terhadap informasi, dan lain sebagainya) yang turut memengaruhi keberadaan pekerja anak, penyaluran, dan keberhasilan suatu program. Lebih lanjut, dalam model estimasi FE dilakukan penyesuaian standar eror dengan melakukan *cluster standard errors* pada tingkat rumah tangga. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa beberapa anak dalam sampel penelitian merupakan anggota dari rumah tangga yang sama.

Tabel 4 menunjukkan bahwa regresi dengan model estimasi FE memberikan hasil estimasi yang konsisten dengan LPM yaitu bahwa kebijakan transfer tunai bersyarat - PKH secara signifikan meningkatkan probabilitas anak untuk bekerja. Hasil estimasi dengan LPM maupun FE menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu anak terlibat pada aktivitas bekerja tanpa upah artinya anak bekerja untuk berkontribusi pada bisnis milik keluarga. Tidak terlihat adanya perbedaan estimasi yang signifikan pada kelompok pekerja anak yang menerima upah (kolom 3 dan 4). Namun, pada anak yang bekerja secara umum (kolom 1 dan 2) dan anak yang bekerja tanpa upah (kolom 5 dan 6), estimasi LPM cenderung menurunkan nilai estimasi (*underestimate*) dari nilai estimasi dengan FE. Namun demikian, seluruh estimasi masih memiliki tingkat signifikansi dan arah yang konsisten. Hasil regresi dengan FE mengindikasikan bahwa karakteristik wilayah (provinsi) yang tidak terobservasi dan bersifat

tetap, serta tren waktu memang benar berpotensi memengaruhi keberadaan dan keberhasilan program PKH bidang pendidikan dan korelasinya terhadap probabilitas keputusan anak untuk bekerja.

KESIMPULAN

Program transfer tunai bersyarat atau CCT diharapkan sebagai salah satu intervensi yang relevan untuk mengatasi akar permasalahan pekerja anak. Selain karena keberlanjutan program bagi penerima manfaat tergantung pada pendaftaran dan kehadiran anak bersekolah, pemberian sejumlah transfer tunai diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga mampu memuluskan konsumsi dasar rumah tangga yang akan menghilangkan alasan anak untuk bekerja.

Studi ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kebijakan transfer tunai bersyarat, program keluarga harapan (PKH), terhadap prevalensi pekerja anak pada keluarga miskin dan sangat miskin penerima program, sebagai akibat dari transfer pendapatan. Temuan dalam studi ini mengungkapkan bahwa PKH bidang pendidikan yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu tujuh tahun belum mampu benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Tujuan intervensi PKH bidang pendidikan, yaitu untuk dapat menarik anak keluar dari pasar tenaga kerja belum dapat tercapai. Studi ini menemukan bahwa pemberian transfer tunai bersyarat - PKH justru berkorelasi secara signifikan dalam meningkatkan probabilitas keputusan anak untuk bekerja pada individu anak penerima manfaat sehingga meningkatkan prevalensi pekerja anak.

Hasil studi ini mengindikasikan bahwa transfer tunai bersyarat yang merupakan tambahan pendapatan bagi rumah tangga miskin dan sangat miskin belum cukup mengkompensasi hilangnya pendapatan jika anak tidak lagi bekerja. Hal ini dapat disebabkan oleh nilai program lebih kecil dibandingkan upah yang diperoleh dari anak yang bekerja sehingga tidak mampu memberikan jaminan finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, anak tetap bekerja walaupun telah menerima sejumlah uang tunai. Selain itu, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa karakteristik wilayah (provinsi) berpotensi memengaruhi keberhasilan program transfer tunai bersyarat - PKH.

Studi ini membawa pada implikasi kebijakan, bahwa untuk dapat mengubah perilaku penerima manfaat ke arah yang diinginkan, maka ukuran atau nilai transfer tunai bersyarat - PKH bidang pendidikan perlu untuk ditingkatkan. Transfer pendapatan di bawah tingkat minimum kebutuhan

dasar tidak akan memengaruhi keputusan anak penerima manfaat untuk bekerja. Namun, nilai transfer tunai hendaknya disesuaikan dengan tingkat kemiskinan dan deprivasi rumah tangga. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi transfer tunai - PKH di level provinsi. Hal ini untuk memastikan permasalahan yang mungkin terjadi pada level provinsi sebagai akibat dari luasnya wilayah diantaranya dapat berupa kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, akses terhadap informasi, maupun dalam kaitannya dengan nilai program yang mungkin akan memberikan dampak yang berbeda, mengingat bahwa standar biaya hidup berbeda untuk setiap provinsi di Indonesia.

REFERENSI

- Angraeni, M. (2019). *Pengaruh program keluarga harapan (PKH) terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin perspektif ekonomi islam (Studi pada Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Attanasio, O., Fitzsimons, E., Gomez, A., Meghir, C., Mesnard, A., & Gutiérrez, M. I. (2010). Children's schooling and work in the presence of a conditional cash transfer program in rural Colombia. *Economic Development and Cultural Change*, 58(2), 181–210.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2). 117-129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Baland, J. M., & Robinson, J. A. (2000). Is child labor inefficient? *Journal of Political Economy*, 108(4), 663–679.
- Badan Pusat Statistik. (2007a). *Survei angkatan kerja nasional (Sakernas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2007b). *Survei sosial ekonomi nasional (Susenas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2014a). *Survei angkatan kerja nasional (Sakernas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2014b). *Survei sosial ekonomi nasional (Susenas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik penunjang pendidikan 2015*. Jakarta: Badan Pusat

- Statistik *Development Perspectives*, 15(C), 1-14.
- Basu, K., & Van, P. H. (1998). The economics of child labor. *The American Economic Review*, 88(3), 412–427.
- Becker, G. S. (1965). A theory of the allocation of time. *The Economic Journal*, 75(299), 493–517.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2018). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88-110.
- Covarrubias, K., Davis, B., & Winters, P. (2012). From protection to production: Productive impacts of the Malawi social cash transfer scheme. *Journal of Development Effectiveness*, 4(1), 50–77.
- De Hoop, J., Friedman, J., Kandpal, E., & Rosati, F. C. (2019). Child schooling and child work in the presence of a partial education subsidy. *Journal of Human Resources*, 54(2), 503–531.
- De Hoop, J., & Rosati, F. C. (2014). Cash transfers and child labor. *The World Bank Research Observer*, 29(2), 202–234.
- Del Carpio, X. V., Loayza, N. V., & Wada, T. (2016). The impact of conditional cash transfers on the amount and type of child labor. *World Development*, 80, 33–47.
- Dumauli, M. T. (2015). Estimate of the private return on education in Indonesia: Evidence from sibling data. *International Journal of Educational Development*, 42, 14–24.
- Edmonds, E. V. (2009). *Defining child labour: A review of the definitions of child labour in policy research*. Geneva: ILO
- Edmonds, E. V., & Schady, N. (2012). Poverty alleviation and child labor. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(4), 100–124.
- Emerson, P. M., Ponczek, V., & Souza, A. P. (2017). Child labor and learning. *Economic Development and Cultural Change*, 65(2), 265–296.
- Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Ilmu, S., Dan, S., & Politik, I. (2015). Kajian program keluarga harapan. In *DJA Kemenkeu*.
- Hidayatina, A., & Garces-Ozanne, A. (2019). Can cash transfers mitigate child labour? Evidence from Indonesia's cash transfer programme for poor students in Java. *World*
- ILO. (2017). *Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016*. Geneva: ILO
- ILO. (2020). Child labour global estimates 2020, trends and the road forward. In *Indian Journal of Practical Pediatrics*, 6(2).
- Kemendikbud. (2020). *Pendanaan pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan formal*. Jakarta: Kemendikbud
- Kemensos RI. (2020). *Pedoman pelaksanaan program keluarga harapan*. Jakarta: Kemensos
- Lee, K. W., & Hwang, M. (2016). Conditional cash transfer against child labor: Indonesia program keluarga harapan. *Asia Pacific Education Review*, 17(3), 391–401.
- Mahyani, A. (2018). Pengaturan putting out system terhadap pekerja anak di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 159-170. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1777>
- Nasution, A. (2016). Peranan modal social dalam pengurangan kemiskinan rumah tangga di perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(2), 171-183
- Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2014). Dampak partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(3), 222-227. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5760>
- Pais, P. S. M., Silva, F. de F., & Teixeira, E. C. (2017). The influence of bolsa familia conditional cash transfer program on child labor in Brazil. *International Journal of Social Economics*, 44(2), 206–221.
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191>
- Rand Corporation. (2007). *The Indonesia family life survey*.
- Rand Corporation. (2014). *The Indonesia family life survey*.
- Sari, C. A. (2019). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Jawa Timur* [Sarjana Thesis]. Universitas Brawijaya.
- Sari, Y. P. (2015). *Analisis spasial untuk data pekerja*

anak di Pulau Jawa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Schnabel, C. (2021). Low-wage employment. *IZA World of Labor*, 2(276v2), 1–10.

Skoufias, E., & Parker, S. W. (2001). Conditional cash transfers and their impact on child work and schooling: Evidence from the progres program in Mexico. *Economía*, 2(1), 45–86.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development (Twelfth edition)*. Harlow: Essex Pearson Education Limited

Unicef. (2012). *Understanding children's work and youth employment outcomes in Indonesia* (Issue June). Geneva: ILO

World Bank. (2011). Main findings from the impact evaluation of Indonesia's pilot household conditional cash transfer program. In *World Bank* (Issue June).

Zahra, I. (2021). Migrasi orang tua dan kognitif anak: Analisis data ILFS 2007 dan 2014. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 145-164.
<https://doi.org/10.14203/jki.v15i2.453>